

... yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Kabupaten/Kabupaten  
 ... yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Kabupaten/Kabupaten  
 ... yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Kabupaten/Kabupaten

Dikeluarkan di : ...  
 Pada Tanggal : 17 Mei 2018  
**KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN YALINDO**  
**NANDU SIREWEX, S.Pd., M.M**  
**Alamat: Utama Mada**  
**NIP. 19681107 199305 1 001**

- TUJUAN KEMERITENAN**
1. Untuk Persekitan dan Persekitan B-D Akarya
  2. Untuk Uraan Pendidikan, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga Provinsi Papua di Jayapura
  3. Untuk Kabupaten Yalindo di Elit
  4. Untuk Uraan DPRD Kabupaten Yalindo di Elit
  5. Untuk Uraan DPRD Daerah Kabupaten Yalindo di Elit
  6. Untuk Uraan DPRD Kabupaten Jayapura di Elit
  7. Untuk DPRD Kabupaten Yalindo di Elit

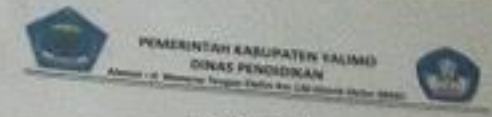
**LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN YALINDO TENTANG PERSETUJUAN IZIN OPERASIONAL PADA SEKOLAH DASAR Negeri MELUKI KOTAKUKI DISTRIK BENEWA KABUPATEN YALINDO TAHUN 2018**

**NOMOR : 430/180/P & P.YALM/2018**  
**TANGGAL : 17 Mei 2018**

**ISU YANG PERSETUJUAN IZIN OPERASIONAL PADA SEKOLAH DASAR Negeri MELUKI KOTAKUKI DISTRIK BENEWA KABUPATEN YALINDO TAHUN 2018**

Nomor Persekitan	Nama dan Alamat Sekolah	Nomor/Status Sekolah	Nomor Pokok Sekolah Nasional
51	SD Negeri Meluki (Distrik BENEWA Kabupaten Yalindo) Alamat: Uraan Jayapura Elit, Kabupaten Yalindo Tahun Berdiri : 2018	301221273117	

Elit, 17 Mei 2018  
**KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN YALINDO**  
**NANDU SIREWEX, S.Pd., M.M**  
**Alamat: Utama Mada**  
**NIP. 19681107 199305 1 001**



**PEMERINTAH KABUPATEN YALINDO**  
**DINAS PENDIDIKAN**

**SURAT KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN YALINDO**  
**NOMOR : 430/180/P & P. YALM/2018**

**TENTANG PERSETUJUAN IZIN OPERASIONAL SEKOLAH DASAR Negeri MELUKI KOTAKUKI DISTRIK BENEWA KABUPATEN YALINDO TAHUN 2018**

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN YALINDO**

- Menimbang** : a. Bahwa dalam rangka Peningkatan Mutu, Peningkatan dan Peningkatan Sekolah, maka diperlukan perlu memberikan Persekitan dan Operasional Sekolah ditunjukkan Peningkatan dan Peningkatan Yalindo
- Menimbang** : a. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Pengajaran Kabupaten Yalindo tentang Persekitan dan Operasional pada sekolah ditunjukkan Peningkatan dan Peningkatan Yalindo
- Menimbang** : 1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 4321)
2. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 32 tahun 2004 tentang Sistem Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 4417) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2008 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 4844)

3. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 14 tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4660)
4. Undang-undang Nomor 21 tahun 2007 tentang Operasi dan Pengajaran Lembaga Papua (Lembaran Negara tahun 2007 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Nomor 44133)
5. Undang-undang Nomor 32 tahun 2004 tentang pemerintahan kabupaten (Lembaran Negara dan Pemerintahan Provinsi Papua dan Kalimantan bagian tahun 2004 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4439)
6. Undang-undang Nomor 4 tahun 2008 tentang Pemerintahan Kabupaten Yalindo di Provinsi Papua
7. Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 1992 tentang Peran serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional
8. Peraturan Pemerintah Nomor 25 tahun 2000 tentang penyelenggaraan Peningkatan dan Peningkatan Provinsi Papua dan Kalimantan bagian tahun 2000 Nomor 34, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3922
9. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3462/13/2004 tentang Peningkatan dan Peningkatan
10. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3462/13/2004 tentang Kurikulum Sekolah Menengah Umum
11. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3462/13/2004 tentang Kurikulum Sekolah Menengah Umum
12. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3462/13/2004 tentang Perubahan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3462/13/2004 tentang Pedoman Penitipan dan Penitipan Guru di Sekolah dalam Lingkungan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan
13. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3462/13/2004 tentang Keputusan Guru Pegawai Negara dan Pegawai Sekolah ditunjukkan lingkungan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan
14. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3462/13/2004 tentang Keputusan Guru Pegawai Negara dan Pegawai Sekolah ditunjukkan lingkungan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan
15. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3462/13/2004 tentang pelaksanaan jabatan fungsional Pegawai Sekolah dan Angka Kreditnya

**MEMUTUSKAN**

- Menetapkan** : Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Yalindo tentang Persekitan dan Operasional pada Sekolah Dasar Negeri Meluki Distrik BENEWA Kabupaten Yalindo Tahun 2018
- PERTAMA** : Memberikan Izin Operasional Sekolah Dasar Negeri Meluki Distrik BENEWA Kabupaten Yalindo sebagaimana terdapat dalam Bab 2 dan Bab 3 Keputusan ini
- KEDUA** : Kepada Sekolah Dasar Negeri Meluki diberikan status sebagai SDN dengan Nomor Statistik Sekolah (NSS) Nomor Pokok Sekolah Nasional

16. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 0286/U/2005 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 0286/U/2005 tentang Pengisian Guru Pengajar Negeri Sipil sebagai Kepala Sekolah di lingkungan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan;
17. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 0286/U/2005 tentang Pengisian Guru Pengajar Negeri Sipil sebagai Kepala Sekolah di lingkungan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan;
18. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 0286/U/2005 tentang Pengisian Guru Pengajar Negeri Sipil sebagai Kepala Sekolah di lingkungan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan;
19. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 0286/U/2005 tentang Pengisian Guru Pengajar Negeri Sipil sebagai Kepala Sekolah di lingkungan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan;
20. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 0286/U/2005 tentang Pengisian Guru Pengajar Negeri Sipil sebagai Kepala Sekolah di lingkungan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan;
21. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 0286/U/2005 tentang Pengisian Guru Pengajar Negeri Sipil sebagai Kepala Sekolah di lingkungan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan;
22. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 0286/U/2005 tentang Pengisian Guru Pengajar Negeri Sipil sebagai Kepala Sekolah di lingkungan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan;
23. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 0286/U/2005 tentang Pengisian Guru Pengajar Negeri Sipil sebagai Kepala Sekolah di lingkungan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan;
24. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 0286/U/2005 tentang Pengisian Guru Pengajar Negeri Sipil sebagai Kepala Sekolah di lingkungan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan;
25. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 0286/U/2005 tentang Pengisian Guru Pengajar Negeri Sipil sebagai Kepala Sekolah di lingkungan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan;
26. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 0286/U/2005 tentang Pengisian Guru Pengajar Negeri Sipil sebagai Kepala Sekolah di lingkungan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan;
27. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 0286/U/2005 tentang Pengisian Guru Pengajar Negeri Sipil sebagai Kepala Sekolah di lingkungan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan;
28. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 0286/U/2005 tentang Pengisian Guru Pengajar Negeri Sipil sebagai Kepala Sekolah di lingkungan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan;
29. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 0286/U/2005 tentang Pengisian Guru Pengajar Negeri Sipil sebagai Kepala Sekolah di lingkungan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan;
30. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 0286/U/2005 tentang Pengisian Guru Pengajar Negeri Sipil sebagai Kepala Sekolah di lingkungan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan;

**MEMUTUSKAN**

- Mendukung
1. Menetapkan dan Menetapkan Sekolah Negeri SD, Diberi Nama Sekolah Negeri dengan nama sebagai berikut: **Sekolah Negeri 31** di Kecamatan **Kotakuru** Kabupaten **Bena** Provinsi **Papua**;
2. Menetapkan dan Menetapkan Sekolah Negeri SD, Diberi Nama Sekolah Negeri dengan nama sebagai berikut: **Sekolah Negeri 32** di Kecamatan **Kotakuru** Kabupaten **Bena** Provinsi **Papua**;
3. Menetapkan dan Menetapkan Sekolah Negeri SD, Diberi Nama Sekolah Negeri dengan nama sebagai berikut: **Sekolah Negeri 33** di Kecamatan **Kotakuru** Kabupaten **Bena** Provinsi **Papua**;
4. Menetapkan dan Menetapkan Sekolah Negeri SD, Diberi Nama Sekolah Negeri dengan nama sebagai berikut: **Sekolah Negeri 34** di Kecamatan **Kotakuru** Kabupaten **Bena** Provinsi **Papua**;
5. Menetapkan dan Menetapkan Sekolah Negeri SD, Diberi Nama Sekolah Negeri dengan nama sebagai berikut: **Sekolah Negeri 35** di Kecamatan **Kotakuru** Kabupaten **Bena** Provinsi **Papua**;
6. Menetapkan dan Menetapkan Sekolah Negeri SD, Diberi Nama Sekolah Negeri dengan nama sebagai berikut: **Sekolah Negeri 36** di Kecamatan **Kotakuru** Kabupaten **Bena** Provinsi **Papua**;
7. Menetapkan dan Menetapkan Sekolah Negeri SD, Diberi Nama Sekolah Negeri dengan nama sebagai berikut: **Sekolah Negeri 37** di Kecamatan **Kotakuru** Kabupaten **Bena** Provinsi **Papua**;
8. Menetapkan dan Menetapkan Sekolah Negeri SD, Diberi Nama Sekolah Negeri dengan nama sebagai berikut: **Sekolah Negeri 38** di Kecamatan **Kotakuru** Kabupaten **Bena** Provinsi **Papua**;
9. Menetapkan dan Menetapkan Sekolah Negeri SD, Diberi Nama Sekolah Negeri dengan nama sebagai berikut: **Sekolah Negeri 39** di Kecamatan **Kotakuru** Kabupaten **Bena** Provinsi **Papua**;
10. Menetapkan dan Menetapkan Sekolah Negeri SD, Diberi Nama Sekolah Negeri dengan nama sebagai berikut: **Sekolah Negeri 40** di Kecamatan **Kotakuru** Kabupaten **Bena** Provinsi **Papua**;
11. Menetapkan dan Menetapkan Sekolah Negeri SD, Diberi Nama Sekolah Negeri dengan nama sebagai berikut: **Sekolah Negeri 41** di Kecamatan **Kotakuru** Kabupaten **Bena** Provinsi **Papua**;
12. Menetapkan dan Menetapkan Sekolah Negeri SD, Diberi Nama Sekolah Negeri dengan nama sebagai berikut: **Sekolah Negeri 42** di Kecamatan **Kotakuru** Kabupaten **Bena** Provinsi **Papua**;
13. Menetapkan dan Menetapkan Sekolah Negeri SD, Diberi Nama Sekolah Negeri dengan nama sebagai berikut: **Sekolah Negeri 43** di Kecamatan **Kotakuru** Kabupaten **Bena** Provinsi **Papua**;
14. Menetapkan dan Menetapkan Sekolah Negeri SD, Diberi Nama Sekolah Negeri dengan nama sebagai berikut: **Sekolah Negeri 44** di Kecamatan **Kotakuru** Kabupaten **Bena** Provinsi **Papua**;
15. Menetapkan dan Menetapkan Sekolah Negeri SD, Diberi Nama Sekolah Negeri dengan nama sebagai berikut: **Sekolah Negeri 45** di Kecamatan **Kotakuru** Kabupaten **Bena** Provinsi **Papua**;
16. Menetapkan dan Menetapkan Sekolah Negeri SD, Diberi Nama Sekolah Negeri dengan nama sebagai berikut: **Sekolah Negeri 46** di Kecamatan **Kotakuru** Kabupaten **Bena** Provinsi **Papua**;
17. Menetapkan dan Menetapkan Sekolah Negeri SD, Diberi Nama Sekolah Negeri dengan nama sebagai berikut: **Sekolah Negeri 47** di Kecamatan **Kotakuru** Kabupaten **Bena** Provinsi **Papua**;
18. Menetapkan dan Menetapkan Sekolah Negeri SD, Diberi Nama Sekolah Negeri dengan nama sebagai berikut: **Sekolah Negeri 48** di Kecamatan **Kotakuru** Kabupaten **Bena** Provinsi **Papua**;
19. Menetapkan dan Menetapkan Sekolah Negeri SD, Diberi Nama Sekolah Negeri dengan nama sebagai berikut: **Sekolah Negeri 49** di Kecamatan **Kotakuru** Kabupaten **Bena** Provinsi **Papua**;
20. Menetapkan dan Menetapkan Sekolah Negeri SD, Diberi Nama Sekolah Negeri dengan nama sebagai berikut: **Sekolah Negeri 50** di Kecamatan **Kotakuru** Kabupaten **Bena** Provinsi **Papua**;

Ditetapkan di : **Elfen**  
 Pada tanggal : **17 Mei 2018**



Bentuk Jangjang Pendidikan SD (Sekolah Dasar) sebagai berikut:

1. **Kepulauan Bena** Kabupaten **Bena** Provinsi **Papua**;

2. **Kepulauan Bena** Kabupaten **Bena** Provinsi **Papua**;

3. **Kepulauan Bena** Kabupaten **Bena** Provinsi **Papua**;

4. **Kepulauan Bena** Kabupaten **Bena** Provinsi **Papua**;

5. **Kepulauan Bena** Kabupaten **Bena** Provinsi **Papua**;

6. **Kepulauan Bena** Kabupaten **Bena** Provinsi **Papua**;

7. **Kepulauan Bena** Kabupaten **Bena** Provinsi **Papua**;

8. **Kepulauan Bena** Kabupaten **Bena** Provinsi **Papua**;

9. **Kepulauan Bena** Kabupaten **Bena** Provinsi **Papua**;

10. **Kepulauan Bena** Kabupaten **Bena** Provinsi **Papua**;

11. **Kepulauan Bena** Kabupaten **Bena** Provinsi **Papua**;

12. **Kepulauan Bena** Kabupaten **Bena** Provinsi **Papua**;

13. **Kepulauan Bena** Kabupaten **Bena** Provinsi **Papua**;

14. **Kepulauan Bena** Kabupaten **Bena** Provinsi **Papua**;

15. **Kepulauan Bena** Kabupaten **Bena** Provinsi **Papua**;

16. **Kepulauan Bena** Kabupaten **Bena** Provinsi **Papua**;

17. **Kepulauan Bena** Kabupaten **Bena** Provinsi **Papua**;

18. **Kepulauan Bena** Kabupaten **Bena** Provinsi **Papua**;

19. **Kepulauan Bena** Kabupaten **Bena** Provinsi **Papua**;

20. **Kepulauan Bena** Kabupaten **Bena** Provinsi **Papua**;

1. **Kepulauan Bena** Kabupaten **Bena** Provinsi **Papua**;

2. **Kepulauan Bena** Kabupaten **Bena** Provinsi **Papua**;

3. **Kepulauan Bena** Kabupaten **Bena** Provinsi **Papua**;

4. **Kepulauan Bena** Kabupaten **Bena** Provinsi **Papua**;

5. **Kepulauan Bena** Kabupaten **Bena** Provinsi **Papua**;

6. **Kepulauan Bena** Kabupaten **Bena** Provinsi **Papua**;

7. **Kepulauan Bena** Kabupaten **Bena** Provinsi **Papua**;

8. **Kepulauan Bena** Kabupaten **Bena** Provinsi **Papua**;

9. **Kepulauan Bena** Kabupaten **Bena** Provinsi **Papua**;

10. **Kepulauan Bena** Kabupaten **Bena** Provinsi **Papua**;

11. **Kepulauan Bena** Kabupaten **Bena** Provinsi **Papua**;

12. **Kepulauan Bena** Kabupaten **Bena** Provinsi **Papua**;

13. **Kepulauan Bena** Kabupaten **Bena** Provinsi **Papua**;

14. **Kepulauan Bena** Kabupaten **Bena** Provinsi **Papua**;

15. **Kepulauan Bena** Kabupaten **Bena** Provinsi **Papua**;

16. **Kepulauan Bena** Kabupaten **Bena** Provinsi **Papua**;

17. **Kepulauan Bena** Kabupaten **Bena** Provinsi **Papua**;

18. **Kepulauan Bena** Kabupaten **Bena** Provinsi **Papua**;

19. **Kepulauan Bena** Kabupaten **Bena** Provinsi **Papua**;

20. **Kepulauan Bena** Kabupaten **Bena** Provinsi **Papua**;

No	Nama Sekolah	Kecamatan	Kelurahan	Kor
01	SD NEGERI 31	KOTAKURU	BEWAHA	IV
02	SD NEGERI 32	KOTAKURU	BEWAHA	IV

Ditetapkan di : **Elfen**  
 Pada tanggal : **17 Mei 2018**



**BUPATI YALIMO**

**KEPUTUSAN BUPATI KABUPATEN YALIMO  
 NO : 27 TAHUN 2018**

**TENTANG**

**PENDIRIAN SEKOLAH BARU SD NEGERI KABUPATEN YALIMO  
 BUPATI YALIMO**

- Mendukung :
- Bahwa dalam rangka meningkatkan kemampuan untuk memperoleh pendidikan untuk daerah terpadu, maka anannya perlu mendirikan sekolah baru SD di Kabupaten Yalimo;
  - Bahwa untuk meningkatkan kualitas pelayanan Mutu SD sekolah SD yang ingin perlu diadatkan tempat yang memadai dan berkualitas;
  - Bahwa berdasarkan Mendang dan Evaluasi Tim Bidang Pendidikan dari Dinas Bina dan Kabupaten Yalimo maka perlu diadatkan untuk pendirian sekolah baru SD;
  - Bahwa maksud tersebut pada huruf "a", "b" dan "c", diatas perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati Yalimo.

- Mengingat :
- Undang-undang Nomor 12 tahun 2008 tentang pembentukan provinsi Otonom dari Bera dan Kabupaten-kabupaten otonom di provinsi (Lembaran Negara tahun 1969 Nomor 47 Tambahan Lembaran Negara Nomor 2927);
  - Undang-undang nomor 2 tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional;

- Undang-undang nomor 21 tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara tahun 2001 nomor 185, Tambahan Lembaran Negara Nomor 14311);
- Undang-undang nomor 42 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara tahun 2004 nomor 125, tambahan lembaran negara nomor 4427);
- Undang-undang Nomor 33 tahun 2004 tentang perimbangan keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran negara tahun 2004 Nomor 185, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
- Undang-undang nomor 4 tahun 2006 tentang Pembentukan Kabupaten Yalimo di Provinsi Papua;
- Peraturan Pemerintah Nomor 29 tahun 1990 tentang Pendidikan Menengah (Lembaran Negara Tahun 1990 nomor 37), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Tahun 1996 (Lembaran Negara Tahun 1996 Nomor 91);
- Peraturan Pemerintah Nomor 58 tahun 1992 tentang Tenaga Pendidik, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2000;
- Peraturan Pemerintah Nomor 39 tahun 1992 tentang Peran serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional;
- Peraturan Pemerintah Nomor 25 tahun 2000 tentang kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, tambahan lembaran negara nomor 3952);
- Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor : 0461/U/984 tentang Penerimaan Kewenangan;
- Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor : 061/U/1993 tentang Kurikulum Sekolah Menengah Umum;
- Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor : 061/U/1993 tentang Kurikulum Sekolah Menengah Umum;
- Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor : 055/U/1994 tentang Perubahan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan